

**REVIU I**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**2015 - 2019**  
**BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA**



**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI**  
**BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA**

Nomor : 417.1/SJ-IND.7-21/7/2016

**TENTANG**

**REVIU PERTAMA RENCANA STRATEGIS  
BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA TAHUN 2015 - 2019**

**KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, perlu disusun Rencana Strategis Balai Diklat Industri Yogyakarta Tahun 2015 – 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikeluarkan keputusan Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta Kementerian perindustrian;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 434);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2014;
  9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
  10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/MIND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
  11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

: KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019.

KEDUA

: Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Balai Diklat Industri Yogyakarta tahun 2015 – 2019 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Diklat Industri Yogyakarta adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang industri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Reviu Pertama Renstra Renstra Balai Diklat Industri Yogyakarta dilakukan untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan strategis yang terjadi mulai pada tahun 2016 ini.
3. Perubahahan lingkungan strategis terutama terjadi pada fokus diklat 3 in 1 pada sektor industri plastik dan alas kaki serta dengan mengurangi atau menghilangkan diklat pada sektor industri kerajinan dan logam.

KETIGA

: Renstra Balai Diklat Industri Yogyakarta Tahun 2015 – 2019 digunakan sebagai pedoman dalam:

1. penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran;
2. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan anggaran;

3. pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
4. penetapan indikator kinerja setiap tahun.

**KEEMPAT** : Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan strategis, Renstra Balai Diklat Industri Yogyakarta Tahun 2015 – 2019 dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian (REVIU) yang ditetapkan dengan Keputusan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 Juli 2016

=====

Kepala,



Tevi Dwi Kurniaty, S.I.P., M.Si.  
NIP. 19641202 198502 2 001

## KATA PENGANTAR

Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 Balai Diklat Industri Yogyakarta dilakukan karena ada perubahan fokus diklat yang semula di sektor industri plastik, logam, dan kerajinan, sekarang berubah ke arah sektor industri plastik dan alas kaki. Rencana strategis Balai Diklat Industri Yogyakarta 2015 – 2019 disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Perindustrian, Sekretariat Jenderal, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri. Renstra ini disusun sebagai arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi Balai Diklat Industri Yogyakarta yaitu menjadi lembaga diklat yang memiliki spesialisasi, berbasis kompetensi, dan berdaya saing pada tahun 2019.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka disusun peta strategi yang merumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 2015 – 2019. Sasaran-sasaran tersebut berorientasi pada *outcome* guna memenuhi harapan *stakeholders*. Lebih jauh lagi, reviu Renstra ini memuat sasaran-sasaran strategis yang lebih tajam dan sederhana yang berfokus pada terwujudnya tenaga kerja industri yang kompeten, tersedianya infrastruktur kompetensi, tersedianya layanan diklat bagi aparatur, tersedianya layanan penguatan kelembagaan, dan tersedianya layanan perkantoran.

Reviu Renstra 2015 – 2019 diharapkan menjadi pedoman dan pegangan menyusun kegiatan setiap tahunnya. Renstra ini dapat direviu kembali apabila membutuhkan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan adanya perubahan kondisi dan kebijakan.

Yogyakarta, 1 Juli 2016

Kepala Balai Diklat Industri Yogyakarta,



*Indiwhaty*  
Tevi Dwi Kurniaty, S.I.P., M.Si.

NIP.196412021985022001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>1.1    Kondisi Umum Pembangunan SDM Industri</b>	<b>1</b>
<b>1.2    Potensi dan Permasalahan Pembangunan SDM Industri</b>	<b>3</b>
<b>BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA</b>	<b>5</b>
<b>2.1    Visi Balai Diklat Industri Yogyakarta</b>	<b>5</b>
<b>2.2    Misi Balai Diklat Industri Yogyakarta</b>	<b>5</b>
<b>2.3    Tujuan</b>	<b>6</b>
<b>2.4    Sasaran Strategis</b>	<b>6</b>
2.4.1    Tujuan 1 (T1) : Terwujudnya SDM industri yang Siap Pakai, Kompeten, Berdaya Saing, dan Sesuai dengan Kebutuhan Industri	7
2.4.2    Tujuan 2 (T2) : Terwujudnya Balai Diklat Industri Yogyakarta sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi	7
2.4.3    Tujuan 3 (T3) : Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja Kelembagaan dalam Menjalankan Proses Bisnis	8
<b>BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	<b>10</b>
<b>3.1    Arah Kebijakan</b>	<b>10</b>
<b>3.2    Strategi Pencapaian dan Program</b>	<b>14</b>
<b>3.3    Kerangka Regulasi</b>	<b>16</b>
<b>3.4    Kerangka Kelembagaan</b>	<b>20</b>
<b>BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>22</b>
<b>4.1    Target Kinerja</b>	<b>22</b>
<b>4.2    Kerangka Pendanaan</b>	<b>27</b>
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	<b>28</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum Pembangunan SDM Industri

Visi Indonesia 2030 menyatakan Indonesia akan mejadi kekuatan kelima di dunia pada tahun 2030 bersama China, Amerika Serikat, India dan Uni Eropa. Untuk mencapai asumsi tersebut, Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 7,62% per tahun, laju Inflasi 4,95% per tahun dan pertumbuhan penduduk rata – rata 1,12% per tahun.

Sebelum mencapai visi Indonesia 2030 tersebut, Indonesia menghadapi beberapa tantangan ke depan yang harus segera dipersiapkan lebih dini lagi. Pasar Bebas ASEAN 2015 atau lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan bonus demografi 2025 akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri menuju visi Indonesia 2030. Persiapan dini tersebut mencakup mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap berdaya saing.

Melihat realitas yang terjadi dalam lingkup pembangunan SDM sampai hari ini, Indonesia sebenarnya belum siap untuk menyongsong visi Indonesia 2030 dengan persiapan – persiapan awalnya seperti MEA dan bonus demografi. Fakta yang terjadi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu menyerap dan menciptakan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja cenderung menurun. Asumsi 1% pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 350 ribu sampai 400 ribu tenaga kerja tidak dapat tercapai. Asumsi tersebut hanya mampu menyerap 200 ribu tenaga kerja tiap tahunnya. HDI (*Human Development Index*) atau Indeks Pembangunan Manusia Indonesia saat ini hanya 0,629 dan menduduki peringkat 121 dari 186 negara di dunia.

Kegagalan SDM hari ini merupakan bagian dari kegagalan perekonomian Indonesia yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di samping belum adanya *roadmap* pengembangan SDM serta visi misi yang jelas dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2004 – 2025. Selain itu, pemerintah

belum mampu meningkatkan secara signifikan masyarakat kelas bawah menuju kelas menengah. Kegagalan ini dapat dilihat dengan realitas dari 250 juta lebih penduduk Indonesia kurang lebih 35 juta masyarakat merupakan masyarakat miskin. Perbandingan pendidikan masyarakat jauh terbalik 3,78% penduduk berpendidikan sarjana dan 53,33% mendominasi berpendidikan SD, dan sekitar 70% angkatan kerja tidak memiliki ketrampilan.

Untuk menghadapi globalisasi serta untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat ini, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. SDM berkualitas dan handal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan. Hambatan pasar tenaga kerja lebih disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa pembangunan SDM industri sebagaimana yang tertuang dalam pasal 16 dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan produktifitas dalam pengembangan sektor industri yang meliputi wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri.

Upaya peningkatan kompetensi SDM merupakan langkah penting untuk dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berkualitas dan berbasis kompetensi serta sesuai dengan kebutuhan dunia usaha terutama sektor industri menjadi salah satu ujung tombak dalam peningkatan kualitas SDM.

Untuk mewujudkan pembentukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing maka diperlukan lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki daya saing dan dapat diakses dengan mudah oleh kalangan SDM industri. Balai Diklat Industri sebagai lembaga diklat yang mempunyai tugas untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, perlu menyusun rencana strategis agar tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik. Rencana strategis ini perlu diselaraskan dengan Program Reposisi Balai Diklat Industri yang dicanangkan oleh Pusdiklat Industri dan telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian nomor 09/SJ-IND/PER/10/2012, di mana Balai Diklat Industri diarahkan untuk menjadi pusat pelatihan SDM industri berbasis spesialisasi dan kompetensi.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan Pembangunan SDM Industri

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

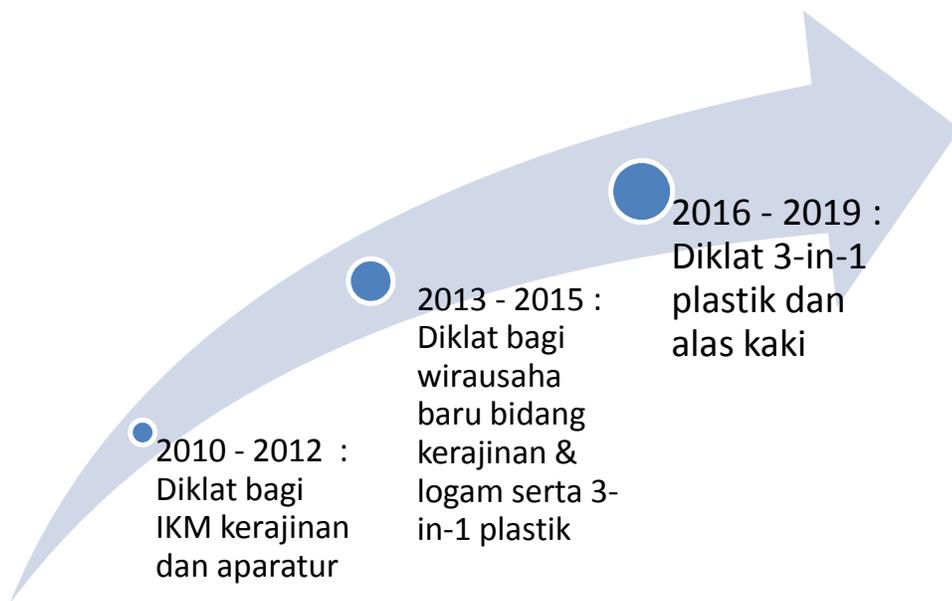
Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan prasyarat terwujudnya industri nasional yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Saat ini, kondisi tenaga kerja Indonesia masih menghadapi permasalahan tingkat kompetensi dan produktivitas kerja yang rendah. Sementara itu tantangan perkembangan ekonomi internasional tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi saja, tetapi juga terbukanya pasar bebas tenaga kerja yang telah berlaku melalui program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dan didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI.

Menyikapi tantangan tersebut, Balai Diklat Industri Yogyakarta memiliki peran untuk diharapkan mampu berkontribusi dengan melakukan penguatan SDM tenaga kerja bermutu unggul yang merupakan salah satu syarat bagi ekselerasi dan keberlanjutan pertumbuhan sektor industri.

Balai Diklat Industri Yogyakarta harus mampu berperan sebagai pusat pelatihan industri berbasis kompetensi dan spesialisasi. Sampai saat ini, spesialisasi yang dikembangkan oleh Balai Diklat Industri Yogyakarta meliputi sektor industri plastik, logam, dan kerajinan. Untuk sektor industri plastik, program yang dikembangkan adalah pelatihan, sertifikasi, dan diakhiri dengan penempatan tenaga kerja. Kegiatan ini selanjutnya disebut sebagai *Program Three in One* (tiga kegiatan meliputi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan dalam satu program). Sementara itu, sektor industri logam dan kerajinan diarahkan untuk menumbuhkan wirausaha baru yang dicapai melalui diklat yang berjenjang maupun inkubator bisnis. Selain potensi industri plastik, logam, dan kerajinan, Balai Diklat Industri Yogyakarta di akhir tahun 2015 telah menginisiasi diklat *three in one* untuk sektor industri alas kaki dengan menggandeng Politeknik Akademi Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta.

Sektor industri plastik dan alas kaki memiliki kemiripan yaitu sama-sama

membutuhkan tenaga kerja industri yang besar atau padat karya serta memiliki pasar komoditas yang luas. Sebaliknya, sektor industri logam dan kerajinan membutuhkan keterampilan SDM dan pasar komoditas yang spesifik. Oleh karena itu, jumlah tenaga kerja yang mampu diserap melalui sektor industri logam dan kerajinan tidak sebanyak sektor industri plastik maupun alas kaki. Melihat permasalahan ini, Balai Diklat Industri Yogyakarta perlu mereviu kembali arah kebijakan pengembangan SDM sektor industri. Mulai tahun 2016, penekanan program diklat diarahkan ke sektor industri padat karya dan lebih fokus pada sertifikasi dan penempatan kerja melalui program *three in one*.



Gambar 1.1 Perkembangan diklat Balai Diklat Industri Yogyakarta

**BAB 2**  
**VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BALAI DIKLAT**  
**INDUSTRI YOGYAKARTA**

**2.1 Visi Balai Diklat Industri Yogyakarta**

Visi Balai Diklat Industri Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari visi Pusdiklat Industri selaku organisasi yang membawahi Balai Diklat Industri Yogyakarta. Sehubungan dengan program reposisi, Pusdiklat Industri telah mencanangkan visi yaitu “Menjadi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi yang Unggul dan Berdaya Saing Global pada Tahun 2025”.

Mengingat Balai Diklat Industri merupakan satuan kerja yang berada di bawah koordinasi Pusdiklat Industri dan berdasarkan program reposisi Balai Diklat Industri yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian di mana Balai Diklat Industri diarahkan untuk menjadi pusat pelatihan IKM berbasis spesialisasi dan kompetensi, maka Balai Diklat Industri Yogyakarta telah mencanangkan visi yang akan dicapai pada tahun 2019 yaitu : ***“Menjadi Lembaga Diklat yang Memiliki Spesialisasi, Berbasis Kompetensi, dan Berdaya Saing pada Tahun 2019”***.

**2.2 Misi Balai Diklat Industri Yogyakarta**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Balai Diklat Industri Yogyakarta mengemban misi sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan diklat secara profesional dan berbasis kompetensi, serta berorientasi pada kebutuhan industri.
2. Membangun Balai Diklat Industri Yogyakarta sebagai lembaga diklat yang memiliki spesialisasi dan kompetensi di bidang plastik dan alas kaki.
3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang profesional.

### 2.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka dilakukan perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis ini merupakan implementasi misi yang akan dicapai dalam lima tahun serta digunakan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai dengan melihat capaian pada indikator kinerja.

Tujuan Balai Diklat Industri Yogyakarta yang ingin dicapai hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya SDM industri yang siap pakai, kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan industri.
2. Terwujudnya Balai Diklat Industri Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi.
3. Meningkatnya kompetensi dan kinerja kelembagaan dalam menjalankan proses bisnis.

Tabel 2.1 Tujuan dan inidikator kinerja tujuan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan
T1	Terwujudnya SDM industri yang siap pakai, kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan industri	1. Jumlah tenaga kerja industri lulusan program diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri
T2	Terwujudnya Balai Diklat Industri Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi	1. Jumlah kurikulum dan modul diklat yang dihasilkan berbasis spesialisasi dan kompetensi 2. Jumlah operasional LSP dan TUK
T3	Meningkatnya kompetensi dan kinerja kelembagaan dalam menjalankan proses bisnis	1. Nilai kualitas perencanaan, evaluasi dan manajemen kinerja 2. Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan dan pelatihan

### 2.4 Sasaran Strategis

Tujuan organisasi kemudian dijabarkan dalam sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahunnya hingga secara keseluruhan tujuan tercapai pada tahun

2019. Selain itu, sasaran juga digunakan untuk mempermudah kegiatan monitoring dan evaluasi dari keberhasilan dan implementasi Renstra 2015-2019.

#### **2.4.1 Tujuan 1 (T1) : Terwujudnya SDM industri yang Siap Pakai, Kompeten, Berdaya Saing, dan Sesuai dengan Kebutuhan Industri**

Untuk mewujudkan SDM industri yang siap pakai, kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan industri ditetapkan sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran T1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
SS1	Terwujudnya tenaga kerja industri yang kompeten	1. Jumlah calon tenaga kerja industri lulusan program diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri atau dikenal dengan sistem <i>three in one</i>

#### **2.4.2 Tujuan 2 (T2) : Terwujudnya Balai Diklat Industri Yogyakarta sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi**

Tabel 2.3 memperlihatkan sasaran strategis dari tujuan terwujudnya lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi.

Tabel 2.3 Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran T2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
SS2	Tersedianya infrastruktur kompetensi	1. Jumlah kurikulum dan modul diklat yang dihasilkan 2. Jumlah operasional LSP dan TUK
SS3	Tersedianya layanan diklat bagi aparatur	1. Jumlah layanan diklat bagi aparatur berbasis kompetensi dan spesialisasi

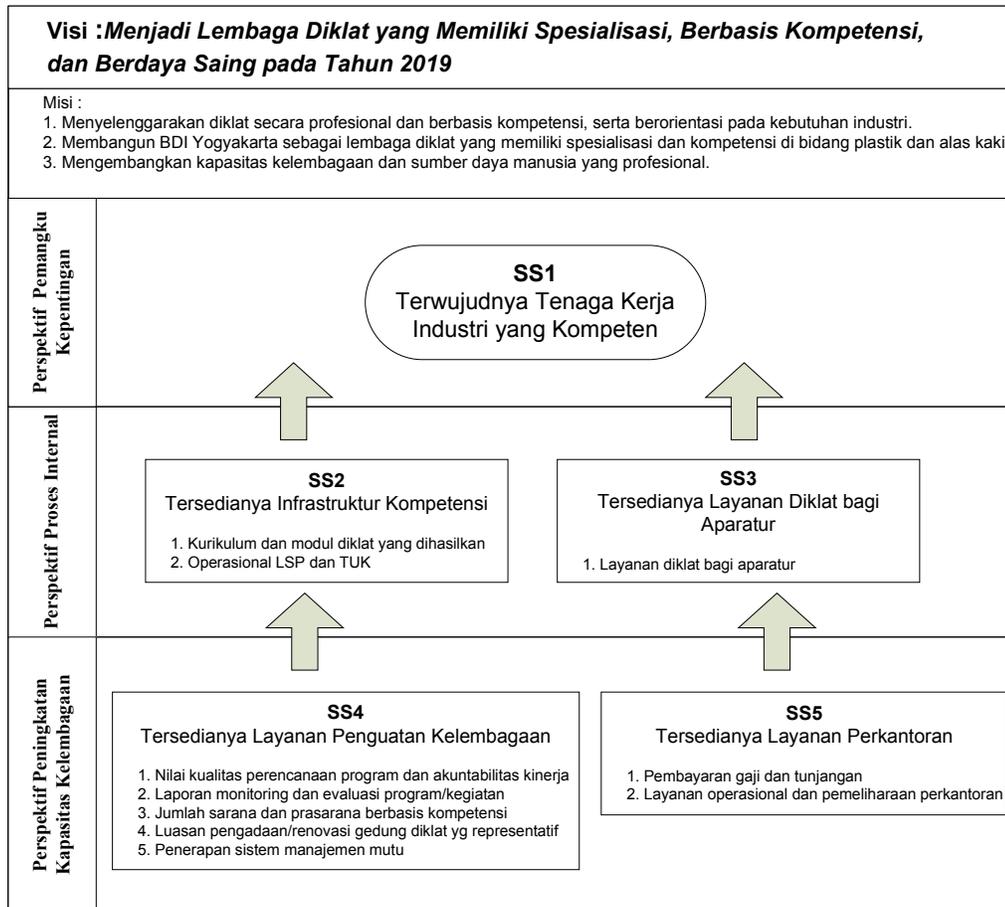
### 2.4.3 Tujuan 3 (T3) : Meningkatnya Kompetensi dan Kinerja Kelembagaan dalam Menjalankan Proses Bisnis

Untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja kelembagaan dalam menjalankan proses bisnis ditetapkan beberapa sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Sasaran strategis dan inidikator kinerja sasaran T3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
SS4	Tersedianya layanan penguatan kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai kualitas perencanaan program dan akuntabilitas kinerja</li><li>2. Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan</li><li>3. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana diklat berbasis kompetensi</li><li>4. Luasan pengadaan/renovasi gedung diklat yang representatif</li><li>5. Penerapan sistem manajemen mutu</li></ol>
SS5	Tersedianya layanan perkantoran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai</li><li>2. Layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran</li></ol>

Visualisasi sasaran-sasaran strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan tujuan dapat dilihat melalui peta strategis Balai Diklat Industri Yogyakarta seperti yang terlihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1 Peta strategis Balai Diklat Industri Yogyakarta

**BAB 3**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN**  
**KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1 Arah Kebijakan**

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana baik dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke tiga (2015-2019) disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program aksi presiden/wakil presiden serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia menjadi negara mandiri, maju, adil, dan makmur pada tahun 2025 sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, pembangunan industri nasional diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang kuat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi di luar pulau Jawa.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan industri nasional tersebut, Pusdiklat Industri menetapkan arah kebijakan pembangunan SDM industri dengan menekankan pada aspek-aspek berikut.

1. Memperkuat dan mengembangkan lembaga pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi.
2. Memperkuat dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.
3. Mengembangkan infrastruktur kompetensi bidang industri prioritas.

4. Mendorong dan memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem *three in one* (pelatihan, sertifikasi dan penempatan) untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
5. Mempercepat sistem sertifikasi tenaga kerja industri melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi dan penetapan sistem sertifikasi wajib.
6. Pendirian dan pengembangan pendidikan vokasi industri pada Perwilayahan Industri, khususnya di luar Pulau Jawa.

Balai Diklat Industri Yogyakarta sebagai satuan kerja di bawah Pusdiklat Industri telah melakukan reposisi dengan memfokuskan diri pada pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem *three in one* bagi tenaga kerja industri. Arah kebijakan yang menjadi fokus Balai Diklat Industri Yogyakarta adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan tenaga kerja industri yang kompeten melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri atau dikenal dengan sistem *three in one*.
2. Mengembangkan infrastruktur kompetensi di sektor industri plastik dan alas kaki.

Gambaran sasaran strategis dan indikator kinerja utama mulai dari level Kementerian Perindustrian, Sekretariat Jenderal, Pusdiklat Industri hingga Balai Diklat Industri Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 berikut.

Tabel 3.1 Indikator kinerja utama Kementerian Perindustrian

No.	Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perindustrian
1	Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas</li> <li>2. Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB Nasional.</li> </ol>
2	Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional</li> </ol>
3	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap total nilai tambah sektor industri</li> </ol>

No.	Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perindustrian
		2. Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.
4	Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional	1. Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM 2. Penyerapan tenaga kerja IKM
5	Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi	1. Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
6	<b>Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri</b>	<b>1. Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri</b>
7	Menguatnya struktur industri	1. Rasio impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal terhadap PDB industri pengolahan non-migas

Tabel 3.2 Indikator kinerja utama Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian

No.	Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal
1	Mewujudkan pelayanan prima	1. Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> eksternal 2. Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> internal
2	Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas	1. Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen <i>trilateral meeting</i> 2. Persentase anggaran Kementerian Perindustrian yang masuk dalam catatan halaman IV DIPA / persentase anggaran yang dibintangi 3. Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian
3	Layanan administrasi yang profesional dan akuntabel	1. Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN 2. Persentase nilai penetapan status pengelolaan BMN Kementerian Perindustrian

No.	Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal
		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Nilai hasil audit kearsipan</li> <li>4. Persentase pemberitaan negatif Kementerian Perindustrian</li> </ul>
4	Layanan hukum dan organisasi yang handal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase peraturan perundang-undangan bidang industri yang diundangkan</li> <li>2. Persentase kasus hukum yang diselesaikan</li> <li>3. Tingkat keefektivitas organisasi kementerian</li> </ul>
5	<b>Meningkatkan daya saing SDM industri dan kinerja ASN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1. Jumlah SDM industri yang terserap di dunia kerja</b></li> <li>2. Rata-rata nilai prestasi pegawai kementerian</li> <li>3. Rata-rata produktivitas kinerja</li> </ul>
6	Informasi industri yang mudah diakses dan relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kesesuaian ketersediaan data dan informasi industri dalam SIINas terhadap kebutuhan/permintaan <i>stakeholder</i></li> </ul>
7	Tata kelola BMN kementerian yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase efisiensi penggunaan energi</li> <li>2. Persentase sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan</li> </ul>

Tabel 3.3 Indikator kinerja utama Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian

No.	Sasaran Strategis Pusdiklat Industri	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusdiklat Industri
1	Terwujudnya pembina industri yang kompeten	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembina industri yang memiliki sertifikat kompetensi</li> </ul>
2	<b>Terwujudnya tenaga kerja industri yang kompeten</b>	<b>1. Tenaga kerja industri yang memiliki sertifikat kompetensi dan bekerja</b>
3	Terwujudnya konsultan industri yang kompeten	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultan industri yang memiliki sertifikat kompetensi</li> </ul>
4	Terwujudnya wirausaha industri yang kompeten	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wirausaha industri yang memiliki sertifikat kompetensi</li> </ul>

Tabel 3.4 Indikator kinerja utama Balai Diklat Industri Yogyakarta

No.	Sasaran Strategis BDI Yogyakarta	Indikator Kinerja Utama (IKU) BDI Yogyakarta
1	Terwujudnya tenaga kerja industri yang kompeten	1. Jumlah calon tenaga kerja industri lulusan program diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri atau dikenal dengan sistem <i>three in one</i>

### 3.2 Strategi Pencapaian dan Program

Balai Diklat Industri Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan sejumlah arah kebijakan dan strategi pencapaian yang harus terlaksana dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tabel 3.5 menjabarkan tujuan dan sasaran strategis Balai Diklat Industri Yogyakarta ke dalam arah kebijakan dan strategi pencapaian.

Tabel 3.5 Tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi

No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
T1	<b>Tujuan 1: Terwujudnya SDM industri yang siap pakai, kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan industri</b>		
SS1	Terwujudnya tenaga kerja industri yang kompeten	Menyelenggarakan diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri ( <i>three in one</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendirikan LSP, TUK dan <i>teaching factory</i></li> <li>2. Membuat kurikulum dan modul sesuai dengan standar kompetensi kerja</li> <li>3. Menyelenggarakan diklat secara profesional dilanjutkan dengan sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja</li> </ol>
T2	<b>Tujuan 2 : Terwujudnya Balai Diklat Industri Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi</b>		
SS2	Tersedianya infrastruktur kompetensi	Mengembangkan infrastruktur kompetensi yang meliputi LSP, TUK, kurikulum dan modul pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan SKKNI</li> <li>2. Pendirian LSP dan TUK</li> <li>3. Peningkatan jumlah asesor kompetensi</li> </ol>

No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
SS3	Tersedianya layanan diklat bagi aparatur	Mewujudkan pembina industri maupun SDM aparatur yang kompeten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi SDM BDI Yogyakarta</li> <li>2. Magang industri</li> <li>3. Penyelenggaraan pelatihan untuk pembina industri, asesor kompetensi, widyaiswara, instruktur</li> <li>4. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola diklat/administrasi</li> </ol>
T3	<b>Tujuan 3 : Meningkatnya kompetensi dan kinerja kelembagaan dalam menjalankan proses bisnis</b>		
SS4	Tersedianya layanan penguatan kelembagaan	Menguatkan lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana</li> <li>2. Mewujudkan gedung diklat yang lebih representatif</li> <li>3. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015</li> <li>4. Peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja</li> <li>5. Pemantauan dan evaluasi program/kegiatan</li> </ol>
SS5	Tersedianya layanan perkantoran	Meningkatkan kinerja dan operasional perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu</li> <li>2. Pemenuhan kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran</li> </ol>

Pelaksanaan berbagai strategi tersebut dijabarkan dalam satu program teknis yang masuk dalam rumpun program di bawah Sekretariat Jenderal yaitu **Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian**. Program ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian. Program ini dijabarkan dalam kegiatan prioritas yang diemban oleh Balai Diklat Industri Yogyakarta yaitu “Peningkatan

Kualitas SDM Industri”. Program ini dijabarkan sebagai berikut.

1. Peningkatan kompetensi SDM industri terutama industri plastik dan alas kaki
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur
3. Penguatan dokumen infrastruktur kompetensi
4. Penguatan kelembagaan Balai Diklat Industri
5. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder
6. *Monitoring* dan evaluasi program/kegiatan
7. Peningkatan sarana dan prasarana

### **3.3 Kerangka Regulasi**

Sejak berlakunya program reposisi, kerangka regulasi Balai Diklat Industri Yogyakarta mengalami banyak sekali perubahan. Mulai tahun 2013, Balai Diklat Industri Yogyakarta telah mereposisi dirinya dengan memfokuskan diri pada pendidikan dan pelatihan berbasis pada industri plastik, logam dan kerajinan. Oleh karena itu, melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 Balai Diklat Industri Regional IV Yogyakarta berubah nama menjadi Balai Diklat Industri Yogyakarta (tanpa Regional IV) yang mengemban semangat reposisi di bidang komoditas industri plastik, logam dan kerajinan. Melalui nomenklatur ini pula, area kerja Balai Diklat Industri Yogyakarta sudah tidak berfokus pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah saja, tetapi sudah mencakup seluruh Indonesia dengan spesialisasi pada industri plastik, logam, dan kerajinan.

Kemudian pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Salah satu amanah penting dalam UU tersebut yang terkait dengan Balai Diklat Industri Yogyakarta adalah pembangunan SDM industri yang meliputi wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri dan konsultan industri. Pembangunan tenaga kerja industri dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten di bidang industri sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Melalui Undang-undang nomor 3 tahun 2014, Kementerian Perindustrian juga diamanahkan untuk membuat Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN. Pada tahun 2015, RIPIN telah selesai dirumuskan dan ditetapkan

melalui Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2015. RIPIN ditetapkan untuk jangka waktu dua puluh tahun yaitu 2015 – 2035. RIPIN 2015 – 2035 memuat hal-hal sebagai berikut :

1. visi, misi, dan strategi pembangunan industri,
2. sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri,
3. bangun industri nasional,
4. pembangunan sumber daya industri nasional,
5. pembangunan sarana dan prasarana industri,
6. pemberdayaan industri,
7. perwilayahan industri, dan
8. kebijakan afirmatif industri kecil dan menengah.

Melalui RIPIN telah ditetapkan sepuluh industri prioritas yang menjadi fokus pembangunan industri. Kesepuluh industri tersebut adalah sebagai berikut :

- |   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. industri pangan</li> <li>2. industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan</li> <li>3. industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. industri tekstil,</li> <li>b. <b>industri kulit dan alas kaki</b>,</li> <li>c. industri furnitur dan barang lainnya dari kayu,</li> <li>d. <b>industri plastik</b>, pengolahan karet, dan barang lainnya dari karet.</li> </ol> </li> <li>4. industri alat transportasi</li> <li>5. industri elektronika dan telematika (ICT)</li> <li>6. industri pembangkit energi</li> </ol> | } | industri andalan   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>7. industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri</li> </ol>   | } | industri pendukung |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>8. industri hulu agro</li> <li>9. industri logam dasar dan bahan galian non-logam</li> <li>10. industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara</li> </ol>  | } | industri hulu      |

Sektor industri plastik yang menjadi spesialisasi Balai Diklat Industri Yogyakarta menjadi salah satu industri andalan dalam pembangunan industri

Indonesia. Untuk lebih memantapkan posisi sebagai lembaga diklat penumbuhan tenaga kerja industri yang kompeten, mulai tahun 2015 Balai Diklat Industri Yogyakarta menambah spesialisasinya ke arah industri alas kaki sebagai sektor industri andalan lainnya selain plastik. Selain itu, Balai Diklat Industri Yogyakarta juga mereviu kembali pelaksanaan diklat di sektor industri logam dan kerajinan karena tidak termasuk dalam sektor industri andalan.

Khusus untuk pembangunan sumber daya industri, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri sebagai penjabaran UU nomor 3 tahun 2014. Kriteria-kriteria pelatihan berbasis kompetensi seperti yang diatur dalam PP nomor 41 tahun 2015 adalah sebagai berikut.

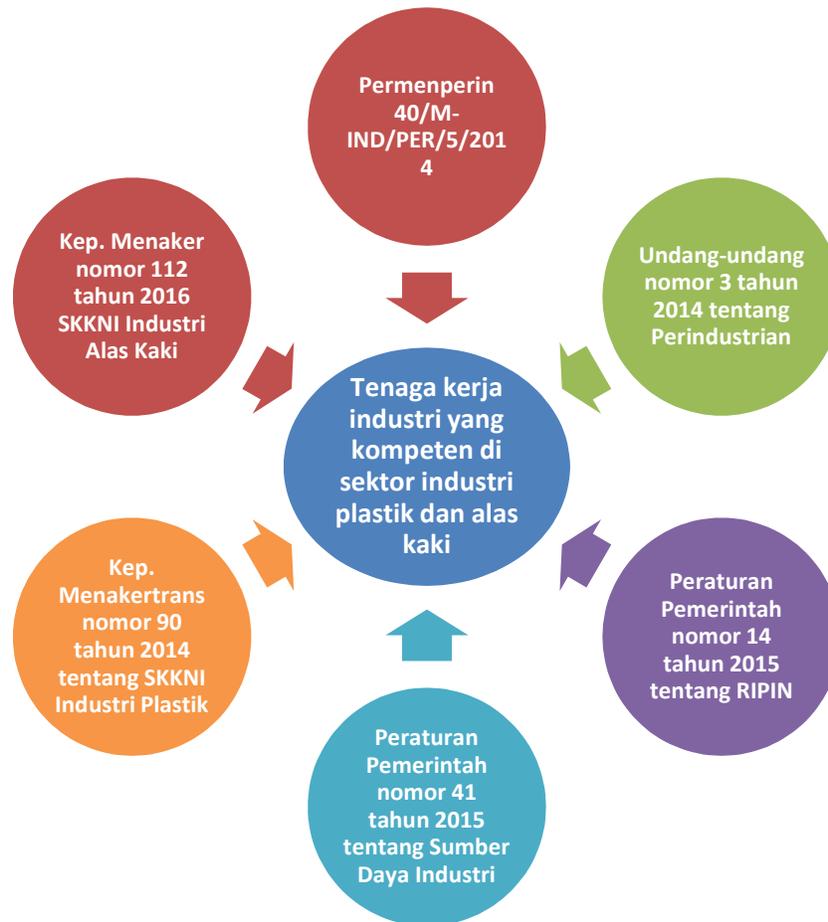
1. Pelatihan industri berbasis kompetensi diselenggarakan dengan mengacu pada SKKNI di bidang Industri.
2. Penyelenggaraan pelatihan industri berbasis kompetensi harus dilengkapi dengan LSP, pabrik dalam lembaga diklat, dan TUK.
3. Dalam hal penyelenggaraan pelatihan industri berbasis kompetensi belum dilengkapi dengan LSP, penyelenggara harus melakukan kerja sama dengan LSP yang bidangnya sejenis.
4. Dalam hal penyelenggaraan Pelatihan industri berbasis kompetensi belum dilengkapi dengan pabrik dalam lembaga diklat dan/atau TUK, penyelenggara harus melakukan kerja sama dengan perusahaan industri dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan.
5. Penyelenggaraan pelatihan industri berbasis kompetensi diakhiri dengan sertifikasi kompetensi.
6. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh LSP.
7. Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, pelaku industri, dan masyarakat dapat menyelenggarakan pelatihan industri berbasis kompetensi.
8. Penyelenggaraan pelatihan industri berbasis kompetensi dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Latihan Kerja serta lembaga pelatihan lain.

9. Penyelenggara pelatihan industri berbasis kompetensi mendapatkan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena Balai Diklat Industri Yogyakarta menekankan pada sektor industri plastik dan alas kaki, SKKNI yang diacu meliputi

1. SKKNI Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik Kelompok Usaha Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan (Kep. Menakertrans nomor 90 tahun 2014), dan
2. SKKNI Industri Alas Kaki (Kep. Menaker nomor 112 tahun 2016).

Keseluruhan regulasi di atas dapat dilihat melalui kerangka regulasi pada Gambar 3.1 berikut.

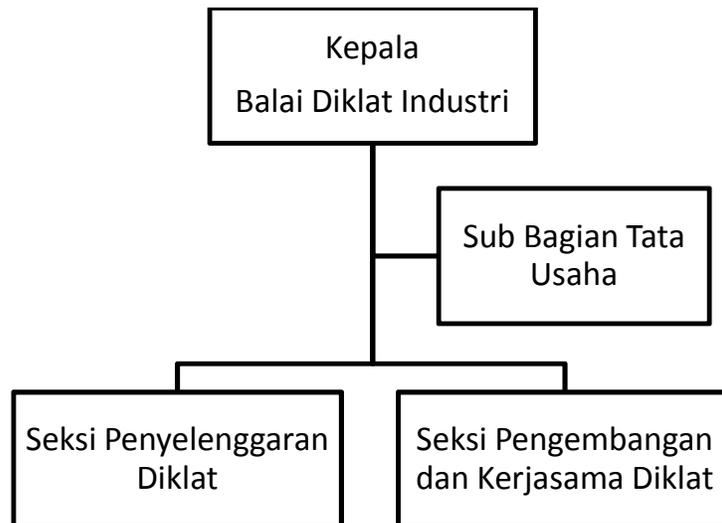


Gambar 3.1 Kerangka regulasi Balai Diklat Industri Yogyakarta dalam mewujudkan tenaga kerja industri yang kompeten di sektor industri plastik dan alas kaki

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

Balai Diklat Industri Yogyakarta merupakan instansi pemerintah setingkat eselon tiga. Balai Diklat Industri dipimpin oleh seorang kepala setingkat eselon IIIa yang bertanggung jawab kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri Kementerian Perindustrian. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Balai Diklat dibantu oleh tiga pejabat eselon IVa dan kelompok penjabat fungsional.

Mulai tahun 2015 struktur organisasi Balai Diklat Industri Yogyakarta mengalami perubahan. Perubahan struktur ini mengikuti perkembangan tugas pokok, fungsi dan peran strategis organisasi yang berubah setelah reposisi pada tahun 2013. Struktur organisasi yang baru ini telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/4/2014.



Gambar 3.2 Struktur organisasi Balai Diklat Industri Yogyakarta

Kepala Balai Diklat Industri dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sub Bagian/Seksi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja, keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri.

2. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi, penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
3. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penempatan, *monitoring* pasca pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan *workshop/teaching factory/inkubator* bisnis.
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB 4

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja

Dalam rangka meraih visi yang ingin dicapai pada tahun 2019, Balai Diklat Industri telah merumuskan tujuan yang ingin dicapai hingga tahun 2019. Tujuan tersebut adalah (a) terwujudnya SDM industri yang siap pakai, kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan industri; (b) terwujudnya Balai Diklat Industri Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi; serta (c) meningkatnya kompetensi dan kinerja kelembagaan dalam menjalankan proses bisnis.

Tujuan Balai Diklat Industri Yogyakarta diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai setiap tahun hingga tujuan tersebut tercapai secara keseluruhan pada 2019. Sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan antara lain (a) terwujudnya tenaga kerja industri yang kompeten; (b) tersedianya infrastruktur kompetensi; (c) tersedianya layanan diklat bagi aparatur; (d) tersedianya layanan penguatan kelembagaan; dan (e) tersedianya layanan perkantoran. Kelima sasaran strategis tersebut akan diimplementasikan secara terukur dengan sebelas indikator kinerja disertai dengan target-target tahunan selama periode 2015 – 2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2. Dari sebelas indikator kinerja tersebut, yang menjadi indikator kinerja utama atau IKU Balai Diklat Industri Yogyakarta adalah jumlah calon tenaga kerja industri lulusan program diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri atau dikenal dengan sistem *three in one*.

IKU Balai Diklat Industri Yogyakarta merupakan turunan IKU dari Pusdiklat Industri, Sekretariat Jenderal, dan IKU dari Kementerian Perindustrian. Ilustrasi IKU tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Indikator kinerja utama Balai Diklat Industri Yogyakarta

<b>Eselon</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>
Kemenperin	Kementerian Perindustrian	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri	Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri
1	Sekretariat Jenderal	Meningkatkan daya saing SDM industri dan kinerja ASN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah SDM industri yang terserap di dunia kerja</li> <li>2. Rata-rata nilai prestasi pegawai kementerian</li> <li>3. Rata-rata produktivitas kinerja</li> </ol>
2	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri	Terwujudnya tenaga kerja industri yang kompeten	Tenaga kerja industri yang memiliki sertifikat kompetensi dan bekerja
3	Balai Diklat Industri Yogyakarta	Terwujudnya tenaga kerja industri yang kompeten	Jumlah calon tenaga kerja industri lulusan program diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri atau dikenal dengan sistem <i>three in one</i>

Tabel 0.2 Indikator kinerja Balai Diklat Industri Yogyakarta tahun 2015 – 2019

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja					Program	Kegiatan
				2015	2016	2017	2018	2019		
Terwujudnya SDM industri yang siap pakai, kompeten, berdaya saing, dan sesuai dengan kebutuhan industri (T1)	Jumlah tenaga kerja industri lulusan program diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri	Terwujudnya tenaga kerja industri yang kompeten (SS1)	Jumlah calon tenaga kerja industri lulusan program diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri atau dikenal dengan sistem <i>three in one</i>	1.393	900	2.000	3.000	3.000	Peningkatan kualitas SDM industri	Diklat 3-in-1 Sektor Industri Plastik
				575	100	1.000	2.000	2.000		Diklat 3-in-1 Sektor Industri Alas Kaki
				97	-	-	-	-		WUB Logam
				121	-	-	-	-		WUB Kerajinan
Terwujudnya Balai Diklat Industri Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi (T2)	(1) Jumlah kurikulum dan modul diklat yang dihasilkan berbasis spesialisasi dan kompetensi;  (2) Jumlah operasional LSP dan TUK	Tersedianya infrastruktur kompetensi (SS2)	Jumlah kurikulum diklat yang dihasilkan	-	8	6	6	6	Pengembangan infrastruktur kompetensi	Penyusunan kurikulum diklat
			Jumlah modul diklat yang dihasilkan	-	10	10	10	10		Penyusunan modul diklat
			Jumlah operasional LSP dan TUK	-	1	1	1	1		Operasional LSP dan TUK

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja					Program	Kegiatan
				2015	2016	2017	2018	2019		
		Tersedianya layanan diklat bagi aparatur (SS3)	Jumlah layanan diklat bagi aparatur berbasis kompetensi dan spesialisasi	3	-	-	-	-	Peningkatan kualitas SDM aparatur	SI-I, Seminar/Forum
			Jumlah layanan diklat bagi aparatur berbasis kompetensi dan spesialisasi	2	3	3	2	2		PBJP, HPS, LKPP
Meningkatnya kompetensi dan kinerja kelembagaan dalam menjalankan proses bisnis (T3)	(1) Nilai kualitas perencanaan, evaluasi dan manajemen kinerja; (2) Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan dan pelatihan	Tersedianya layanan penguatan kelembagaan (SS4)	Nilai kualitas perencanaan program dan akuntabilitas kinerja	0,50	0,70	0,80	0,85	0,90	Perencanaan dan evaluasi serta manajemen kinerja	Penyusunan dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja
			Penerapan sistem manajemen mutu	100%	100%	100%	100%	100%		Pengelolaan ISO 9001:2015
			Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan	2	4	-	-	-	Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan	Temu industri, monev industri, monev alumni diklat
			Jumlah sarana dan prasarana berbasis kompetensi	66	250	10	10	10	Pengadaan sarana, prasarana maupun gedung	Pengadaan alat pendidikan, sarana prasarana diklat
			Luasan pengadaan/renovasi gedung yang representatif	600 m <sup>2</sup>	660 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>		Renovasi gedung

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja					Program	Kegiatan
				2015	2016	2017	2018	2019		
		Tersedianya layanan perkantoran (SS5)	Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Pembayaran gaji dan tunjangan	Pembayaran gaji dan tunjangan
			Layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Operasional dan pemeliharaan perkantoran	Perawatan BMN Operasional kantor, Jasa kebersihan, pengamanan & sopir

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam bagian sebelumnya, telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Balai Diklat Industri Yogyakarta. Adapun keberhasilan pencapaian target-target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN (dana pemerintah). Dana APBN yang digunakan berasal dari rupiah murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 4.3 Kerangka pendanaan anggaran 2015 – 2019 Balai Diklat Industri Yogyakarta

Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan kualitas SDM industri	9.000.000	4.000.000	12.000.000	20.000.000	20.000.000
Infrastruktur kompetensi	-	700.000	300.000	300.000	300.000
Layanan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	700.000	250.000	250.000	200.000	200.000
Laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan	50.000	1.000.000	-	-	-
Sarana dan prasarana diklat berbasis kompetensi	1.600.000	2.800.000	-	-	-
Layanan internal (BMN, perencanaan, evaluasi, manajemen kinerja)	-	-	1.100.000	1.500.000	1.500.000
Layanan perkantoran	3.600.000	4.000.000	4.250.000	4.500.000	4.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>14.950.000</b>	<b>12.750.000</b>	<b>17.900.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>26.500.000</b>

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

Renstra Balai Diklat Industri Yogyakarta 2015 – 2019 disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Perindustrian, Sekretariat Jenderal, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri. Renstra ini disusun sebagai arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi Balai Diklat Industri Yogyakarta yaitu menjadi lembaga diklat yang memiliki spesialisasi, berbasis kompetensi, dan berdaya saing pada tahun 2019, dengan misi sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan diklat secara profesional dan berbasis kompetensi, serta berorientasi pada kebutuhan industri.
2. Membangun Balai Diklat Industri Yogyakarta sebagai lembaga diklat yang memiliki spesialisasi dan kompetensi di bidang plastik dan alas kaki.
3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang profesional.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut maka disusun peta strategi yang merumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 2015 - 2019. Sasaran-sasaran tersebut berorientasi pada *outcome* guna memenuhi harapan *stakeholders*. Sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya tenaga kerja industri yang kompeten.
2. Tersedianya infrastruktur kompetensi.
3. Tersedianya layanan diklat bagi aparatur.
4. Tersedianya layanan penguatan kelembagaan.
5. Tersedianya layanan perkantoran.

Pencapaian sasaran-sasaran strategis tersebut dilakukan melalui penetapan arah kebijakan periode 2015 - 2019 yaitu menyelenggarakan diklat melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri (*three in one*); mengembangkan infrastruktur kompetensi yang meliputi LSP, TUK, kurikulum dan modul pelatihan; mewujudkan pembina industri maupun SDM aparatur yang kompeten; menguatkan

lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; dan meningkatkan kinerja dan operasional perkantoran.

Arah kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam matriks target kinerja dan pendanaan yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan. Matriks tersebut digunakan sebagai alat evaluasi dan *monitoring* pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya. Renstra dapat dilakukan reviu atau revisi sesuai dengan perkembangan kebijakan perindustrian dan kebijakan terkait. Renstra ini diharapkan dapat selalu menjadi panduan, acuan dan arah dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya selama kurun waktu 2015 - 2019.